

**PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN, REKONSILIASI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH :  
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Alor NTT)**

**<sup>1</sup>Emil Idrus <sup>2</sup>Ikhsan Budi Riharjo <sup>3</sup>Suwardi Bambang H**

Program Studi S2 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Email :<sup>1</sup>emilidrus@gmail.com<sup>2</sup>ikhsanbudiriharjo@stiesia.ac.id<sup>3</sup>suwardibambang@stiesia.ac.id

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Intensitas Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKD) dimoderasi oleh Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI),

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf bagian akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. Penentuan sampel melalui purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 82 responden. Analisis data diolah dengan menggunakan SPSS melalui metode statistik regresi berganda dengan pendekatan Moderasi yaitu Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Intensitas Rekonsiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi positif dan signifikan pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah sedangkan pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi negatif dan signifikan pengaruh penerapan SPIP dan Intensitas Rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**Kata kunci** : Kualitas LKD, Kompetensi SDM, Penerapan SPIP, Intensitas Rekonsiliasi, dan Pemanfaatan TI

**THE EFFECT OF COMPETENCE, CONTROL SYSTEM, RECONCILIATION ON  
THE QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORTS :  
INFORMATION TECHNOLOGY AS A MODERATION VARIABLE**

**(Empirical Study of Regional Device Organizations in the Government of Alor NTT)**

**<sup>1)</sup>Emil Idrus <sup>2)</sup>Ikhsan Budi Riharjo <sup>3)</sup>Suwardi Bambang H**

Program Studi S2 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Email :<sup>1)</sup>emilidrus@gmail.com<sup>2)</sup>ikhsanbudiriharjo@stiesia.ac.id<sup>3)</sup>suwardibambang@stiesia.ac.id

***Abstrak***

This study aimed to examine and analyze the effect of competence of Human Resources (HR), Implementation of Government Internal Control Systems (SPIP), intensity of Reconciliation on the Quality of Regional Financial Statements (LKD) moderated by the Usage of Information Technology (IT).

This study applied primary data that were obtained from a questionnaires that were directly distributed to respondents, i.e. the Officer of Financial Management (PPK) and accounting department staff in the Regional Government in Alor Regency. The sample were 82 respondents who were taken with purposive sampling. Moreover, the data was analyzed using SPSS through multiple regression statistical methods and the Moderation approach, namely Moderated Regression Analysis (MRA).

The analysis results indicated that the Human Resources competency and the Implementation of the Government's Internal Control System had positive and significant effects on the quality of Regional Financial Reports. However, the Intensity of Reconciliation had negative and significant effects on the quality of Regional Financial Reports. While, the usage of Information Technology positively and significantly moderated the impact of HR's competency on the quality of regional financial reports. Then, the usage of Information Technology negatively and significantly moderated the effects of SPIP and reconciliation intensity on the quality of regional financial statements.

**Keywords:** Quality of DFS, HR Competence, Application of SPIP, Intensity of Reconciliation, and Utilization of IT

## 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan *good governance* (tata kelola yang baik), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam hal pemenuhan informasi yang berkualitas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka saat ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual (*cash toward accrual*). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan bahwa penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, dilaksanakan paling lambat tahun 2015.

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bagi Pemerintah Kota dan Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Dengan hadirnya Permendagri tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam mengembangkan informasi yang terkandung didalam Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut.

Usaha konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Alor sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengendalian akuntansi yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan asistensi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Asistensi dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan akun-akun dan beban akrual, sehingga laporan yang disajikan memenuhi prinsip periodisitas dan prinsip *matching cost against revenue*, dengan kata lain Laporan Keuangan akhir tahun adalah sebagai bahan evaluasi bagi seluruh komponen yang telah menggunakan anggaran untuk dipertanggungjawabkan dalam rangka penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah.

Kualitas menurut (Imam Mulyana, 2010:96) adalah sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Sedangkan kualitas menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Sedangkan Laporan Keuangan menurut (Masmudi, 2003:77) Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Winidyaningrum, 2010).

Fenomena atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia adalah masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Temuan tersebut didominasi oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah utamanya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berakibat kualitas laporan keuangan menurun (Puspitawati, 2016). Seperti halnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sistem Pengendalian Intern(SPI) di lingkup pemerintah Kabupaten Alor antara lain : belum tertibnya pengelolaan kas di bendahara pengeluaran; belum tertibnya penatausahaan dan pelaporan asset tetap; tidak sesuai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku; ketidakmampuan OPD dalam menyajikan pos-pos laporan keuangan dengan tepat; bukti untuk dukungan data kurang lengkap dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD dan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD kurang informatif.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai kualitas laporan keuangan diantaranya Yensi (2014), hasil penelitian menunjukkan kompetensisumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula Yuniati *et al.* (2012) hasil penelitian menemukan bahwa *employee engagement* dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan Puspitawati (2016) bahwa kompetensisumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internpemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Sudiarianti (2015), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ringkasan dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya konsistensi terhadap faktor-faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan. Hasil yang didapat oleh Yuniati *et al* (2012), Yensi (2014), Sudiarianti(2015) dan Puspitawati (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern, hasil penelitian oleh Sudiarianti (2015) dan Puspitawati (2016) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Yensi (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan di atas dan beberapa *research gap* dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis tertarik untuk diteliti lebih lanjut tentang “Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Intensitas Rekonsiliasi, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah :Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi?”. Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel Intensitas Rekonsiliasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi SDM, penerapan SPIP dan intensitas Rekonsiliasi berpengaruh terhadap kualitas LKD. Apakah pemanfaatan TI memoderasi pengaruh kompetensi SDM, penerapan SPIP dan intensitas Rekonsiliasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

## 2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donaldson dan Davis (1997) teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi bahwa manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa manajemen merupakan pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manager atau *steward* akan berusaha secara maksimal dalam mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemuahan kebutuhan) dan pemilik atau prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaatnya ke teori *stewardship* adalah informasi yang disampaikan lebih berkualitas, dan berdasarkan teori tersebut ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan teori *stewardship* dimana Pemerintah yang bertindak sebagai manager mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah dan bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal yaitu menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah daerah selaku manager wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori *stewardship*, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD.

### 2.1. PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.

Kompetensi yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan adalah kemampuan sumber daya manusia. Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ataupun yang menjalankan fungsi akuntansi harus memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Kemampuan tersebut adalah pendidikan/pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Bukti empiris adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan ditemukan oleh, Yuniatin *et al.* (2012), Roviyantie (2011) dalam Yensi (2014),

Sudiarianti (2015), Puspitawati (2016) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian bahwa Sumber Daya Manusia yang berkompentensi dan memiliki kecakapan serta pengetahuan dalam pengolahan informasi akan menghasilkan laporan keuangan yang bernilai tinggi dan berkualitas. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak memiliki keterampilan untuk mempertanggung jawabkan sistem dan kualitas laporan, maka laporan tidak bernilai.

Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, H1 yang diajukan adalah:

**H1** : *Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor.*

## 2.2. PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.

Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2010) Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem Pengendalian internal yang bertanggung jawab akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena terdapat *control* yang baik dari dalam sehingga laporan yang disajikan ke masyarakat benar sesuai kejadian yang sebenarnya. Bukti empiris adanya pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan yaitu Penelitian oleh Yensi (2014), Sudiarianti (2015) dan Puspitawati (2016) menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sesuai tujuan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 bahwa Laporan keuangan disusun berdasarkan SPI yang memadai, dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) secara layak sesuai dengan SAP.

Menurut Sukmaningrum (2012), pengaruh sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem pengendalian manajemen meliputi berbagai alat management yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, H2 yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H2** : *Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor.*

## 2.3. PENGARUH INTENSITAS REKONSILIASI DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.

Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar data akuntansi yang dihasilkan dapat

diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa Rekonsiliasi oleh BUD dilakukan dengan cara verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga dijelaskan bahwa Rekonsiliasi dapat membantu instansi perangkat daerah menghasilkan data yang akurat sehingga turut meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, H3 yang diajukan adalah:

**H3 :** *Intensitas Rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor.*

#### 2.4. PENGARUH KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum (2010).

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja, Winidyaningrum (2010). Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang memadai memudahkan dalam menjalankan sistem informasi yang dikembangkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan sistem informasi semakin baik pula tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Pradono (2015) yang menyatakan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wibawa (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Puspitawati (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menempatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai pemoderasi atas pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah, peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang sudah dipaparkan diatas, maka H4 yang diajukan adalah :

**H4 :** *Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi positif pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Alor.*

#### 2.5. PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING.

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum (2010).

Sistem pengendalian management meliputi berbagai alat management yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah, Sukmaningrum (2012).

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Pradono (2015) yang menyatakan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wibawa (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Puspitawati (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai pemoderasi atas pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang sudah dipaparkan diatas, maka H5 yang diajukan adalah :

**H5** : *Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) memoderasi pengaruh positif penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Alor.*

## 2.6. PENGARUH INTENSITAS REKONSILIASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa Rekonsiliasi oleh BUD dilakukan dengan cara verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum (2010).

Dengan bantuan sistem informasi dalam melakukan rekonsiliasi secara baik maka, dapat meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



Semakin intens rekonsiliasi dilakukan dengan bantuan sistem informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Pradono (2015) yang menyatakan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wibawa (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Puspitawati (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menempatkan Pemanfaatan TI sebagai pemoderasi atas pengaruh Intensitas Rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang sudah dipaparkan diatas, maka H6 yang diajukan adalah:

**H6 :** *Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) memoderasi pengaruh positif Intensitas Rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Alor.*

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. POPULASI DAN SAMPEL

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan bantuan instrumen kuesioner serta wawancara terkait variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau yang menjalankan fungsi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar di pemerintah Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dengan asumsi bahwa mereka memahami semua kegiatan penatausahaan pada OPD masing-masing.

Sampel yang diambil adalah pegawai yang bertugas di bagian akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggungjawab dan tugas pokok fungsi dalam penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria:

1. Status pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang fungsi akuntansi dan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Jumlah OPD sebanyak 43 (empat puluh tiga) dengan masing-masing 2 (dua) responden pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga total sampel sebanyak 86 responden.

#### 3.2. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah Variabel Independennya yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Intensitas Rekonsiliasi. Variabel moderasinya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan Variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skala yang digunakan adalah skala sikap *Likert* lima poin. Untuk penilaiannya yaitu: 1= sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak setuju (TS), 3 = netral (N), 4 = setuju (S), 5 = sangat setuju (SS).

##### 1. Variabel Dependen

Kualitas laporan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Ukuran-ukuran normatif merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar

laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah diukur melalui instrument yang dikembangkan oleh Puspitawati (2016) dengan menggunakan 9 Pertanyaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur Kualitas Laporan Keuangan Daerah ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Indikator yang digunakan yaitu 1.Relevan, 2.Andal 3.Dapat dibandingkan dan 4.Dapat dipahami.

## 2. Variabel Independen

### a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki PPK-SKPD dan staf akuntansi di lingkungan Pemkab Alor dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam penatausahaan keuangan secara profesional, efektif dan efisien. Variabel kompetensi Sumber Daya Manusia diukur melalui instrument yang dikembangkan oleh Roviyantje (2011) dalam Yensi (2014) dengan menggunakan 8 item pertanyaan yang diadopsi dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Indikator yang digunakan yaitu: 1.pengetahuan, 2.keterampilan dan 3.sikap.

### b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui suatu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diukur melalui Instrumen yang dikembangkan oleh Karmila, *et al.* (2014) dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang diadopsi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Indikator yang digunakan yaitu 1.Lingkungan Pengendalian, 2.Penilaian Resiko, 3.Kegiatan Pengendalian, 4.Informasi dan Komunikasi dan 5.Pemantauan Pengendalian Intern.

### c. Intensitas Rekonsiliasi

Intensitas Rekonsiliasi dalam penelitian ini adalah pencocokan data transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber yang sama sebelum disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya untuk tujuan penggabungan. Variabel intensitas rekonsiliasi telah dilakukan *pilot test* atau uji kuesioner terhadap 20 orang aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kota Surabaya, yang dilaksanakan pada tanggal 22 januari 2019. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas disimpulkan bahwa dari 5 item pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel/konsisten dalam melakukan fungsinya sebagai alat ukur. Instrument yang digunakan untuk mengukur Variabel Intensitas Rekonsiliasi diadopsi berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan 5 item pertanyaan. Indikator yang digunakan yaitu 1.Verifikasi, 2.Evaluasi dan 3.Analisis.

## 3. Variabel Moderasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Manfaat yang diperoleh dalam

pemanfaatan teknologi informasi adalah mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diukur melalui instrument yang dikembangkan oleh Puspitawati (2016) dengan menggunakan 5 item pertanyaan yang diadopsi dari PP nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Indikator yang digunakan yaitu 1. Kemajuan informasi komunikasi, 2. Perkembangan web dan teknologi internet, 3. Perubahan Sistem Pelaporan, dan 4. Sarana dan parasarana yang memadai, dan 5. Pemeliharaan yang teratur.

### 3.3. ANALISIS DATA

#### 1. Uji Instrumen Data

##### - Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dari alat ukur yang digunakan (kuesioner). Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai korelasi atau  $r$  hitung dari variabel penelitian dengan nilai  $r$  tabel. Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka pertanyaan dinyatakan valid.

##### - Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot method* atau pengukuran sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan melihat *Cronbach's Alpha*. Suatu penelitian dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,70 (Ghozali, 2018:48).

#### 2. Uji Asumsi Klasik

##### - Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Pengujian ini dilakukan dengan uji statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari *one-sample Kolmogorov-Smirnov* adalah Jika hasil *one-sample Kolmogorov-Smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas;

##### - Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara yang digunakan untuk mendekteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan menggunakan Nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF), Jika nilai Tolerance  $>$  0,10 dan VIF  $<$  10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

##### - Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan metode *Glejser*. Uji *glejser* meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2018) dengan kriteria bahwa apabila hasil  $\text{sig} >$  0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### 3. Pengujian Hipotesis

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh kompetensi SDM, penerapan SPIP, intensitas Rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (hipotesis H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>) sebagai berikut:

$$KLKD = a + b_1SDM + b_2SPIP + b_3REKON + \varepsilon$$

b. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Persamaan regresi untuk menentukan hipotesis H4 adalah:

$$KLKD = a + b_1SDM + \varepsilon \dots\dots\dots(4.1)$$

$$KLKD = a + b_1SDM + b_2TI + \varepsilon \dots\dots\dots(4.2)$$

$$KLKD = a + b_1SDM + b_2TI + b_3SDM * TI + \varepsilon \dots\dots\dots(4.3)$$

Persamaan regresi untuk menentukan hipotesis H5 adalah:

$$KLKD = a + b_1SPIP + \varepsilon \dots\dots\dots(5.1)$$

$$KLKD = a + b_1SPIP + b_2TI + \varepsilon \dots\dots\dots(5.2)$$

$$KLKD = a + b_1SPIP + b_2TI + b_3SPIP * TI + \varepsilon \dots\dots\dots(5.3)$$

Persamaan regresi untuk menentukan hipotesis H6 adalah:

$$KLKD = a + b_1REKON + \varepsilon \dots\dots\dots(6.1)$$

$$KLKD = a + b_1REKON + b_2TI + \varepsilon \dots\dots\dots(6.2)$$

$$KLKD = a + b_1REKON + b_2TI + b_3REKON * TI + \varepsilon \dots\dots\dots(6.3)$$

dimana :

Y	= Kualitas laporan keuangan daerah OPD (KLKD)
X1	= Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
X2	= Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
X3	= Intensitas Rekonsiliasi (REKON)
X4	= Teknologi Informasi (TI)
a	= konstanta
b1 - b7	= koefisien regresi

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdiri subjek dan objek dimana seorang diminta untuk memberikan tanggapan atau keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat disebut sebagai subjek atau responden. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf yang menjalankan fungsi akuntansi yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar di pemerintah Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Sedangkan yang diteliti atau dikenai penelitian disebut objek. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar di pemerintah Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung dalam bentuk hard copy di 43 (empat puluh tiga) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Alor yang dibagikan kepada responden masing-masing 2 (dua) set kuesioner yaitu masing-masing Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf yang menjalankan fungsi akuntansi, sehingga kuesioner yang disebar berjumlah 86 (delapan puluh enam).

Tabel 1  
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Instansi	Sebaran kuesioner	Kembali	Tidak kembali
1	Dinas	24	48	44	4
2	Badan	7	14	14	-
3	Bagian	8	16	16	-
4	Kantor	4	8	8	-
	Jumlah	43	86	82	-

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah).

#### 4.2.KARAKTERISTIK RESPONDEN

Berdasarkan hasil survey responden terhadap 82 responden pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur terdiri dari karakteristik jenis kelamin responden sebanyak 48 laki-laki atau sebesar 58,5% dan responden wanita sebanyak 34 atau sebesar 41,5%. Jumlah jenis kelamin responden didominasi berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya karakteristik jabatan responden, jabatan responden yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebanyak 41 atau sebesar 50% dan jabatan staf akuntansi sebanyak 41 atau sebesar 50%. Karakteristik Usia responden, yaitu usia 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 2 atau sebesar 2,4%, usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 41 atau sebesar 50%, usia 40 tahun keatas sebanyak 30 atau sebesar 47,6%. Jumlah usia responden didominasi oleh usia 31 sampai dengan 40 tahun. Selanjutnya karakteristik pendidikan responden, responden berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 36 atau sebesar 43,9%, pendidikan diploma sebanyak 7 atau sebesar 8,5%, responden berpendidikan sarjana sebanyak 36 atau sebesar 43,9% dan responden berpendidikan magister sebanyak 3 atau sebesar 3,7%. Jumlah pendidikan responden didominasi pendidikan sarjana. Karakteristik masa kerja responden, masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun sebanyak 14 atau sebesar 17,1% dan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 68 atau sebesar 82,9%. Jumlah masa kerja responden didominasi masa kerja yaitu lebih dari 10 tahun.

#### 4.3.ANALISIS PENGUJIAN DATA

##### 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Valid tidaknya suatu instrument dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya yakni dengan membandingkan nilai *Corrected Item Total Correlation* yaitu Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika signifikansi dari  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka item variabel disimpulkan valid, diketahui  $r$  tabel sebesar (0,05; 82 = 0,217).

Tabel 2  
Validitas Variabel Penelitian

Variabel	indikator	<i>Corrected Item Total Correlation</i> (rhitung)	r tabel 5% (82)	Keterangan
<b>Variabel Kompetensi SDM</b>	SDM_1	0.692	0,217	Valid
	SDM_2	0.741	0,217	Valid
	SDM_3	0.832	0,217	Valid
	SDM_4	0.757	0,217	Valid
	SDM_5	0.644	0,217	Valid
	SDM_6	0.582	0,217	Valid
	SDM_7	0.679	0,217	Valid
	SDM_8	0.653	0,217	Valid
<b>Variabel Penerapan SPIP</b>	SPIP_1	0.682	0,217	Valid
	SPIP_2	0.666	0,217	Valid
	SPIP_3	0.671	0,217	Valid
	SPIP_4	0.789	0,217	Valid
	SPIP_5	0.454	0,217	Valid
	SPIP_6	0.752	0,217	Valid
	SPIP_7	0.623	0,217	Valid
	SPIP_8	0.577	0,217	Valid
	SPIP_9	0.657	0,217	Valid
<b>Variabel Intensitas Rekonsiliasi</b>	REKON_1	0.608	0,217	Valid
	REKON_2	0.653	0,217	Valid
	REKON_3	0.817	0,217	Valid
	REKON_4	0.803	0,217	Valid
	REKON_5	0.741	0,217	Valid
<b>Variabel Pemanfaatan TI</b>	TI_1	0.807	0,217	Valid
	TI_2	0.810	0,217	Valid
	TI_3	0.894	0,217	Valid
	TI_4	0.839	0,217	Valid
<b>Variabel Kualitas LKD</b>	KLKD_1	0.334	0,217	Valid
	KLKD_2	0.777	0,217	Valid
	KLKD_3	0.784	0,217	Valid
	KLKD_4	0.786	0,217	Valid
	KLKD_5	0.590	0,217	Valid
	KLKD_6	0.578	0,217	Valid
	KLKD_7	0.727	0,217	Valid
	KLKD_8	0.705	0,217	Valid
	KLKD_9	0.650	0,217	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah).

Berdasarkan hasil uji validitas semua item pertanyaan untuk semua variabel penelitian adalah valid, artinya semua item pertanyaan adalah akurat dalam mendukung konstruk.

Variabel dikatakan *reliabel* jika memberikan nilai *Cronbach alpha* > 0,70 (Nunnaly, 1994 dalam Ghozali, 2018), dengan  $r_{tabel}$  diketahui sebesar (0,05; 82 = 0,217). Nilai *Cronbach alpha* dari semua variabel dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3  
Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
SDM	0.849	0,70	Reliabel/Konsisten
SPIP	0.827	0,70	Reliabel/Konsisten
REKON	0.779	0,70	Reliabel/Konsisten
TI	0.857	0,70	Reliabel/Konsisten
KLKD	0.824	0,70	Reliabel/Konsisten

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah).

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian adalah *reliabel*. Artinya item-item pertanyaan seluruhnya dianggap *reliabel* atau konsisten dalam melakukan fungsinya sebagai alat ukur.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Metode yang digunakan dalam mengetahui normalitas residual adalah Uji Statistik non-parametrik *one-sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Tabel 4  
Uji Normalitas  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.36696540
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.065
	Negative	-.066
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.180 <sup>c</sup>

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah).

Berdasarkan tabel 4 tersebut terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0.088 dengan tingkat signifikansi 0.180 berarti hal tersebut lebih besar dari 0.05.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5  
Multikolinieritas Model Regresi

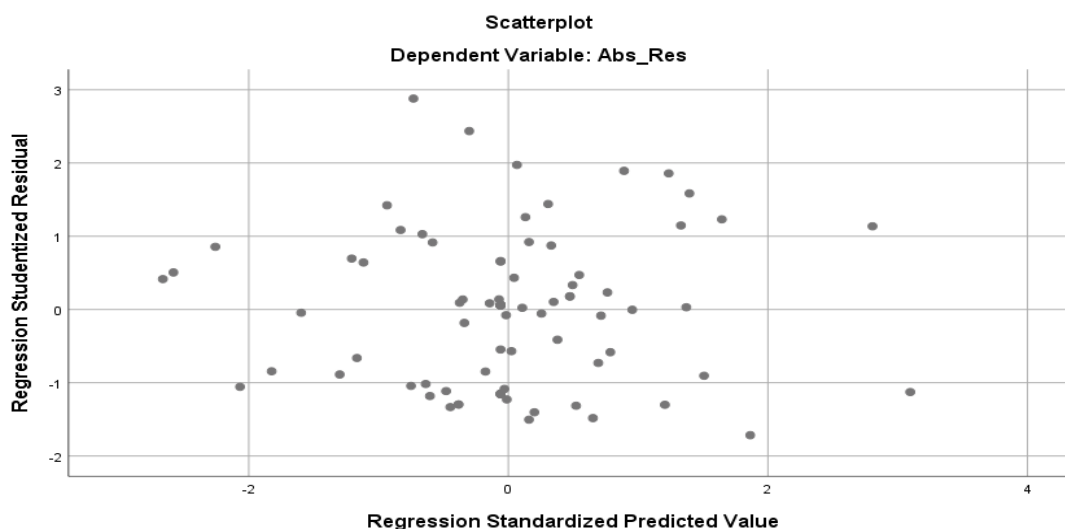
Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi SDM	0.672	1.488	Non Kolinier
Penerapan SPIP	0.668	1.497	Non Kolinier
Intensitas Rekonsiliasi	0.616	1.623	Non Kolinier
Pemanfaatan TI	0.926	1.080	Non Kolinier

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah).

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, dapat dikatakan regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas. Artinya antara variabel independen tidak terjadi hubungan linier atau tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah melalui *polascatterplot*. *Scatterplot* merupakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).



Berdasarkan hasil pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *Scatterplot* menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta menyebar baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga diidentifikasi tidak terjadi heteroskedastisitas, maka model regresi yang diperoleh terbebas dari masalah pembiasan yang diakibatkan oleh adanya pengaruh variabel bebas terhadap kesalahan estimasi.

#### 4.4.PENGUJIAN HIPOTESIS

##### 1. Koefisien Determinasi Total

Koefisien determinasi total digunakan untuk mengetahui total keragaman data yang dijelaskan oleh model. Untuk menghitung koefisien determinasi total, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) \dots (1 - R_p)$$

Dengan rumus tersebut, maka koefisien determinasi total dapat diketahui sebagai berikut:



$$R^2_m = 1-(1-0,226) (1-0,282) (1-0,137) = 0,52$$

Dengan diketahuinya nilai koefisien determinasi total yaitu sebesar 0,52 artinya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model MRA adalah sebesar 52%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan daerah yang dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi SDM, penerapan SPIP, intensitas Rekonsiliasi dan pemanfaatan TI sebagai variabel pemoderasi adalah sebesar 52%, sedangkan sisanya sebesar 48% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

## 2. Uji t

Uji parsial atau uji t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil statistik parsial (uji t) disajikan sebagai berikut :

Tabel 6  
Hasil Uji t

Variabel	Cooficients	t hitung	Sig	Keterangan
Kompetensi SDM	0.261	2.267	0.026	H1 Diterima
Penerapan SPIP	0.336	2.992	0.005	H2 Diterima
Intensitas Rekonsiliasi	0.276	2.246	0.028	H3 Diterima
Kompetensi SDM*Pemanfaatan TI	0.254	2.401	0.019	H4 Diterima
Penerapan SPIP*Pemanfaatan TI	-0.208	-2.090	0.040	H5 Ditolak
Intensitas Rekonsiliasi*Pemanfaatan TI	-0.207	-2.031	0.046	H6 Ditolak

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah).

Berdasarkan tabel 6, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut :

- Berdasarkan tabel 6 bahwa hasil uji t diketahui bahwa Kompetensi SDM dengan tingkat signifikansi  $0.026 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh positif sehingga hipotesis pertama diterima (H1 diterima).
- Berdasarkan tabel 6 bahwa hasil uji t diketahui bahwa Penerapan SPIP dengan tingkat signifikansi  $0.005 < 0,05$  Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh positif sehingga hipotesis kedua diterima (H2 diterima).
- Berdasarkan tabel 6 bahwa hasil uji t diketahui bahwa Intensitas Rekonsiliasi dengan tingkat signifikansi  $0.028 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa variabel Intensitas Rekonsiliasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh positif sehingga hipotesis ketiga diterima (H3 diterima).
- Berdasarkan tabel 6 hasil uji t diketahui bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi  $0.019 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan.

Koefisien regresi menunjukkan pengaruh positif dari variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga hipotesis keempat diterima (H4 diterima).

- e. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t diketahui bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi  $0.040 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh negatif dari variabel pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan arah negatif sehingga hipotesis kelima ditolak (H5 ditolak).
- f. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t diketahui bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh Intensitas Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi  $0.046 < 0,05$  Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh Intensitas Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh negatif dari variabel pemanfaatan teknologi informasi dan Intensitas Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan arah negatif sehingga hipotesis keenam ditolak (H6 ditolak).

#### 4.5. PEMBAHASAN

1. Hasil uji t diketahui bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh positif sehingga hipotesis pertama diterima (H1 diterima). Artinya terdapat hubungan searah atas kompetensi SDM dengan pelaksanaan kualitas laporan keuangan daerah. Semakin kompeten Sumber Daya Manusia dan memiliki kecakapan serta pengetahuan dalam pengolahan informasi akan menghasilkan laporan keuangan yang bernilai tinggi dan berkualitas.  
 Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniatin *et al.* (2012), Roviyantie (2011) dalam Yensi (2014), Sudiarianti (2015), Puspitawati (2016) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Hasil uji t diketahui bahwa variabel Penerapan SPIP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh positif sehingga hipotesis kedua diterima (H2 diterima). Artinya terdapat hubungan searah atas Penerapan SPIP dengan pelaksanaan kualitas laporan keuangan daerah. Sistem Pengendalian internal yang bertanggung jawab bagi Organisasi Perangkat Daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena terdapat *control* yang baik dari dalam sehingga laporan yang disajikan ke masyarakat benar sesuai kejadian yang sebenarnya.  
 Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yensi (2014), Sudiarianti (2015) dan Puspitawati (2016) dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa penerapan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian sejalan dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penerapan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Hasil uji t diketahui bahwa variabel Intensitas Rekonsiliasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh positif sehingga hipotesis ketiga diterima (H3 diterima).

Artinya terdapat hubungan searah atas Intensitas Rekonsiliasi dengan pelaksanaan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil Penelitian ini mendukung dengan hipotesis ketiga yang dibangun oleh peneliti bahwa Intensitas Rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), verifikasi, evaluasi dan analisis dilakukan dalam rangka rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan pencocokan data transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber yang sama sebelum disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya untuk tujuan penggabungan.

4. Hasil uji t diketahui bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh positif dari variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga hipotesis keempat diterima (H4 diterima). Artinya terdapat hubungan searah antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini, didukung oleh penelitian yang dilakukan Winidyaningrum (2010), dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

5. Hasil uji t diketahui bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh arah negatif dari variabel pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga hipotesis kelima ditolak (H5 ditolak).

Ada beberapa penyebab hal ini terjadi diantaranya kurangnya pengendalian internal dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi meliputi keabsahan, otorisasi, kelengkapan, penilaian, klasifikasi, tepat waktu dan posting yang benar. Sesuai penjelasan dari *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa unsur-unsur yang membentuk SPIP antara lain Lingkungan pengendalian; Penilaian resiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern bahwa SPIP dilaksanakan secara menyeluruh baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu peran auditor internal sangat diperlukan agar dapat melakukan evaluasi pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi.

6. hasil uji t diketahui bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh Intensitas Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah signifikan. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh arah negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dan Intensitas Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga hipotesis keenam ditolak (H6 ditolak).

Ada beberapa penyebab hal ini terjadi diantaranya adanya perubahan prosedur dan pembaharuan aplikasi. Informasi hasil rekonsiliasi yang disajikan harus memenuhi

ketentuan mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Puspitawati (2016) menjelaskan bahwa teknologi informasi selain memperoleh, memproses dan menyimpan informasi yang berkualitas juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi dalam penyebaran suatu informasi. Manfaat lain yang diberikan dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu kecepatan dalam melakukan proses informasi.

## 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

### 5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Alor, Hal ini berarti bahwa dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah diperlukan kompetensi SDM yang memadai hal ini kemampuan yaitu pendidikan/pelatihan, dan juga pengalaman oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ataupun yang menjalankan fungsi akuntansi. Walaupun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tersedia, jika tidak didukung dengan kompetensi dan skill khusus oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ataupun yang menjalankan fungsi akuntansi, maka sistem dan prosedur tersebut itu tidak akan berjalan dengan baik.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Alor, Hal ini berarti bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah, maka akan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, serta memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Sistem Pengendalian internal juga menjadi *control* yang baik yang dihasilkan dalam laporan keuangan kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya.
3. Intensitas Rekonsiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Alor, Hal ini berarti bahwa rekonsiliasi jika dilaksanakan sesuai prosedur maka dapat membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghasilkan data yang akurat sehingga turut meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian bahwa semakin sering rekonsiliasi dilakukan, maka akan menghasilkan data yang akurat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat memperkuat. Hal ini menyatakan PPK dan staf yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan OPD dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Dengan Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan keakuratan dan efisiensi sehingga mendukung kualitas Laporan Keuangan Daerah yang relevan dan andal.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat memperlemah. Hal ini terjadi diantaranya kurangnya pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, dimana pengendalian umum dan pengendalian aplikasi meliputi keabsahan, otorisasi, kelengkapan, penilaian, klasifikasi, tepat waktu dan posting yang benar.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi Intensitas Rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat memperlemah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan *database* antara organisasi perangkat daerah (OPD) selaku entitas pelaporan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Selain itu, proses konsolidasi laporan keuangan tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi Laporan Keuangan pemerintah daerah memakan waktu dan biaya karena harus datang dan bertatap muka, serta pengawasan (*monitoring*) proses konsolidasi tidak dapat dilakukan dengan cepat.

### 5.2.SARAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi penelitian yang akan datang, untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Alor hendaknya secara rutin mengadakan diklat penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi atas peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan mengingat latar belakang pendidikan yang beragam. Kompetensi SDM merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitas LKPD, hal ini berarti bahwa dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah diperlukan kompetensi SDM yang memadai hal ini kemampuan yaitu pendidikan/pelatihan, dan juga pengalaman oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ataupun yang menjalankan fungsi akuntansi. Walaupun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tersedia, jika tidak didukung dengan kompetensi dan skill khusus oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ataupun yang menjalankan fungsi akuntansi, maka sistem dan prosedur tersebut itu tidak akan berjalan dengan baik.
2. Nilai koefisien determinasi terhadap variable moderasi yang masih rendah hendaknya dijadikan pertimbangan oleh peneliti berikutnya mengubah model penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan TI tidak dapat memoderasi hubungan antara penerapan SPIP dan Intensitas Rekonsiliasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, maka disarankan memasukkan variabel regulasi sebagai moderating variabel.

### 5.3.IMPLIKASI

Dalam penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kompetensi SDM, penerapan SPIP dan intensitas Rekonsiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi pengaruh positif dan signifikan kompetensi SDM terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan pemanfaatan Teknologi Informasi memoderasi pengaruh negatif dan signifikan penerapan SPIP dan intensitas Rekonsiliasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Secara **praktis**, temuan ini dapat memberikan pemahaman serta wawasan bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, intensitas rekonsiliasi dan pemanfaatan teknologi informasi akan berimplikasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Secara **Teoritis**, hasil temuan ini dapat menjadi sumber informasi terkait kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, intensitas rekonsiliasi dan pemanfaatan teknologi informasi

serta sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh staf yang menyusun laporan keuangan pada tingkat organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di wilayah pemerintah daerah kabupaten Alor. Secara **Kebijakan**, temuan ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah di atasnya yang dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, intensitas rekonsiliasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan yang terkait pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mewujudkan kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor.

#### *5.4.KETERBATASAN*

1. Waktu penyebaran kuesioner dilakukan pada saat beberapa PPK-OPD didapati dalam melaksanakan tugas yaitu mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), sehingga ada kuesioner yang tidak kembali kepada peneliti. Sebaiknya penyebaran kuesioner dilakukan tidak dalam kondisi kegiatan daerah dilaksanakan/(Musrembang).
2. Objek dalam penelitian ini dibatasi pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor. Hal ini menyebabkan memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian apabila penelitian dilakukan menambah atau mengganti pada objek dan daerah penelitian yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Alor saja melainkan di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur.
4. Variabel independen yang digunakan terbatas pada kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, rekonsiliasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

### Daftar Pustaka

- Donalson, L. dan Scannel, E.E. 1993. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Imam Mulyana. 2010. *Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Masmudi. 2003. *Laporan Keuangan Sektor Publik antara konsep dan praktek* Vol 3 No. 1. Mulyadi 2007. *Sistem Akuntansi* , Jakarta. Salemba empat.
- Mulyadi. 2010. *Auditing*. Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/Tahun 2017 tentang *Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga*, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Puspitawati. D. 2016. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada Kabupaten kota di Provinsi Lampung). *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Sudiarianti, N.M. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. ASPSIA.117.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development). Bandung : Alfabeta.
- Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2012. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Undip*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang *Perbendaharaan Negara*, Jakarta.

- Winidyaningrum, C. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi(studi empiris di pemda subosukawonosraten). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Yensi, D.S. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sisten Akuntansi, Keuangan Daerah, dan Sistem Penegendalian Intern (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Fekon*, Vol.01 No.02 Oktober 2014.
- Yuniatin N.Y., Achsani N.A., Sasongko H., 2015. Pengaruh perubahan status employeengagement dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan. *Jurnal ekonomi dan keuangan* Vol. 19 No. 4 des 2015: 495-515.